

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Muhammad Hanif Mujahid

NPP. 31.0597

Asdaf Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: hanifmujahidh17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Regional Original Income (PAD) in Kubu Raya Regency is still far from being compared to central transfer funds, thus encouraging the government to increase Original Regional Income (PAD) through exploring regional potential. Analysis of regional financial independence is important in designing strategies to increase income. **Purpose:** The aim of this research is to analyze the regional financial independence of Kubu Raya Regency, inhibiting factors, and the efforts that have been made by the government to increase regional financial independence. **Method:** This research uses a qualitative method with a descriptive approach. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that regional financial independence according to the ratio analysis of the degree of fiscal decentralization is less, analysis of the ratio of regional financial dependence is very high, analysis of the ratio of regional financial independence is very low, analysis of the effectiveness ratio of PAD management is quite effective, and analysis of the efficiency ratio of PAD is very efficient. **Conclusion:** Regional financial independence in Kubu Raya Regency in 2020-2022 is still lacking. Factors inhibiting regional financial independence in Kubu Raya Regency, namely regional potential that has not been utilized optimally and high regional dependence on transfer funds. Efforts made by the regional government are exploring the potential for new PAD and developing services that make it easier for people to pay taxes

Keywords: Analysis, Regional Financial Independence, Regional Original Income

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kubu Raya masih jauh jika dibandingkan dengan dana transfer pusat, sehingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi-potensi daerah. Analisis kemandirian keuangan daerah menjadi hal penting dalam merancang strategi dalam meningkatkan pendapatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya, Faktor penghambat, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kemandirian keuangan daerah menurut analisis rasio derajat desentralisasi fiskal kurang, analisis

rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, analisis rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah, analisis rasio efektivitas pengelolaan PAD cukup efektif, dan analisis rasio efisiensi PAD sangat efisien. **Kesimpulan:** Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2020-2022 masih kurang. Faktor penghambat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya, yaitu potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah, yaitu menggali potensi-potensi PAD baru dan mengembangkan layanan yang mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak. **Kata kunci:** Analisis, Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah pusat dalam hal keuangan berupa dana transfer. Hal tersebut tentunya didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah tentunya bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemampuan daerah tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengusahakan, mengelola serta mengembangkan setiap potensi yang ada di daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerahnya tanpa harus bergantung terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat (Siregar, 2020).

Kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan daerah. Pelaksanaan pengukuran dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian. Pengukuran mengacu pada pendapatan asli daerah, untuk mengukur kemandirian keuangan digunakan beberapa rasio keuangan yang terdiri dari: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Derajat Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas pengelolaan PAD, dan Rasio Efisiensi PAD (Mahmudi, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah instrumen yang digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD dapat mencerminkan kebutuhan-kebutuhan riil dari masyarakat sesuai dengan potensi yang ada serta dapat memenuhi tuntutan anggaran daerah (Septi Rindawati, 2021:2). Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, kemudian pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber potensial dalam wilayah sendiri dalam bentuk pemungutan yang diberikan oleh daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Djaenuri, 2012).

Presiden memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara yang selanjutnya presiden menyerahkan kepada kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban suatu daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah (Sinurat, 2018). Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan di daerahnya. Hal tersebut supaya mengurangi ketergantungan daerah akan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya, sebagian daerah otonom masih belum mampu membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri karena pendapatan asli daerah yang masih rendah.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kubu Raya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 tahun 2010. Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepalitan, dan manfaat untuk masyarakat. Analisis kemandirian

keuangan menjadi indikator dalam penentuan kebijakan dan penilaian pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kubu Raya masih rendah dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, mendorong pemerintah setempat untuk lebih aktif meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah menggali potensi-potensi PAD baru dan mengembangkan layanan yang mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak. Analisis kemandirian keuangan daerah penting untuk menentukan strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Kontribusi PAD yang masih rendah merupakan salah satunya. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya yang masih rendah mencerminkan ketidakmampuan daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan lokal. Pada tahun 2020 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 10,22% dari total jumlah pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 10,35% dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 12,86%. Meskipun mengalami kenaikan, kesenjangan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah masih cukup tinggi, terbukti dari pendapatan asli daerah Kabupaten Kubu Raya masih sangat bergantung pada dana transfer untuk membiayai urusan pemerintahan.

Masih kurangnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan terjadi dikarenakan belum optimalnya penggalan potensi daerah yang sebenarnya dapat dijadikan objek pajak baru dan belum maksimalnya kemampuan sumber daya aparatur dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya terhadap pendapatan transfer dari pihak eksternal, dalam hal ini dana dari pemerintah pusat.

Kabupaten Kubu Raya masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat, yang dapat dilihat lebih dari 80% sumber pendapatan Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2020 hingga 2022 tetap bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya masih rendah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks kemandirian keuangan daerah. Penelitian Kamilaus Konstantae dkk berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu (Kamilaus Konstantae, dkk, 2020), menemukan tingkat ketergantungan Kabupaten Belu kepada pemerintah pusat sangat tinggi, secara normal, 84,29 persen. Penelitian Royda dan Dwi Riana menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata sangat rendah masih disekitar 0%-25%. Adapun untuk rasio kemandirian keuangan daerah juga tergolong masih kurang yaitu rata-rata berada di antara 0%-10% (Royda dan Dwi Riana, 2019). Penelitian Fahriasnyah Syam dan Ahmad Zulfikar menemukan bahwa Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana masih rendah dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 (Fahriasnyah Syam dan Ahmad Zulfikar, 2022). Penelitian Silvia Karenina dkk selanjutnya berkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tahun 2010-2019. Hasil penelitian ini yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah sehingga penerapan otonomi daerah masih belum baik (Silvia Karenina, dkk, 2021). Penelitian R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung, dkk menemukan bahwa rasio kemandirian dan pertumbuhan keuangan Kota Bandung rata-rata sebesar 74,16% . selanjutnya, terjadi pertumbuhan

keuangan daerah yang cenderung pada arah negatif sebanyak dua kali pada tahun 2017 dan 2020 (R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung, dkk, 2022).

Penelitian Z.Zulkarnain tentang analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa Rasio Desentralisasi, rasio ketergantungan masih sangat tinggi, sedangkan untuk rasio efektivitas dikatakan sudah baik (Z.Zulkarnain, 2020). Penelitian Jovan Febriantoko menemukan bahwa erajet desentralisasi fiskal yang tertinggi pada provinsi Sumatera Utara dan terendah pada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Jovan Febriantoko, 2017). Penelitian Anjar Nora, dkk menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Buleleng dikategorikan rendah. Namun trend yang dihasilkan cenderung naik (Anjar Nora, dkk, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan lima indikator yakni rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas pengelolaan PAD, serta rasio efisiensi PAD. Selain itu penelitian ini juga mengeksplorasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pendekatan yang komprehensif ini memberikan gambaran yang lebih rinci dan spesifik mengenai strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah di kabupaten Kubu Raya..

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, mendeskripsikan faktor-faktor penghambat, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode pengumpulan data induktif. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan suatu metode dimana data yang terkumpul digambarkan sebagaimana adanya di lapangan pada saat penulis melakukan penelitian atau suatu metode yang fleksibel yang dapat berkembang sesuai keadaan yang ada di lapangan berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata ataupun gambar. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini. Pada penelitian kualitatif, penulisan yang dipakai sebagai instrumen kunci (Cresswell, 2016). Data yang ada dikumpulkan sendiri melalui dokumentasi, observasi, maupun wawancara bersama partisipan oleh para penulis kualitatif. Wawancara adalah proses interaksi langsung yang dilakukan antara penulis dengan responden (Syamsul Hadi, 2006). Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur dengan lima informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya, Sekretaris BPKAD Kabupaten Kubu Raya, Kasubbag Rencana kerja dan Keuangan BPKAD Kabupaten Kubu Raya, Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Kubu Raya, Kasubbid Anggaran I BPKAD Kabupaten Kubu Raya. Penulis mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan serta mendukung penelitian ini. Adapun data sekunder yang dikumpulkan yakni Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2020-2022. Kemudian data primer didapatkan melalui wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Penulis menganalisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya dengan lima indikator yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas pengelolaan PAD, serta rasio efisiensi PAD. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, di mana semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi juga tingkat pendapatan dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Tabel 1.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase	Keterangan
2020	151.009.789.228,78	1.477.080.851.351,15	10,22%	Kurang
2021	160.894.591.482,61	1.553.468.400.345,62	10,35%	Kurang
2022	200.314.165.508,71	1.557.558.858.426,59	12,86%	Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan data di atas bahwa persentase nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi selama tahun anggaran 2020-2022 mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020 dari 10,22% menjadi 10,35% yang kemudian pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan nilai rasio menjadi 12,86%. Dalam meningkatkan rasio derajat desentralisasi menuju ke arah yang lebih tinggi diperlukan peran pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan peningkatan pengelolaan potensi-potensi daerah.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan angka ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Pada dasarnya, rasio ketergantungan sama seperti rasio kemandirian keuangan dalam mengukur kemandirian keuangan. Akan tetapi, rasio ketergantungan lebih menekankan pada aspek tingkat ketergantungan suatu daerah oleh pendapatan transfer dalam mengakomodasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022**

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	Persentase	Keterangan
2020	1.040.956.520.388,00	1.477.080.851.351,15	70,47%	Sangat Tinggi
2021	1.310.650.071.331,01	1.553.468.400.345,62	84,36%	Sangat Tinggi
2022	1.344.923.091.240,88	1.557.558.858.426,59	86,34%	Sangat Tinggi

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022 (Data diolah, 2024)

dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena keterbutuhan pemerintah daerah terhadap dana pemerintah pusat guna menutupi anggaran belanja daerah yang telah di anggarkan. Akan tetapi, pendapatan asli daerah yang belum bisa menutupi secara maksimal sehingga permintaan dana kepada pemerintah pusat menjadi besar. Akibatnya, tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kubu Raya tergolong sangat tinggi.

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mendapatkan hasil kemandirian keuangan daerah dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah daerah. Rasio dihitung dengan melakukan perbandingan antara PAD dengan pendapatan transfer yang berasal dari sumber lain, yaitu bantuan pemerintah pusat ataupun provinsi.

Tabel 3.**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Persentase	Keterangan
2020	151.009.789.228,78	1.040.956.520.388,00	14,50%	Instruktif
2021	160.894.591.482,61	1.310.650.071.331,01	12,27%	Instruktif
2022	200.314.165.508,71	1.344.923.091.240,88	14,90%	Instruktif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kubu raya pada tahun 2020 sebesar 151 M, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 160 M dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi sebesar 200 M.. Dari data yang telah disajikan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada tahun 2020-2022 berkisar antara 12-15% masih tergolong rendah. Pola hubungan instruktif menunjukkan peran pemerintah

pusat mendominasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan tingkat kontribusi PAD masih sangat rendah sehingga kemandirian daerah masih sangat rendah.

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan target pagu anggaran yang telah ditetapkan. Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai daerah yang efektif apabila daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan dalam mengelola pendapatan asli daerahnya dalam mencapai rasio efektivitas sesuai atau melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 4.
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Persentase	Keterangan
2020	151.009.789.228,78	160.118.773.189,57	94,31%	Cukup Efektif
2021	160.894.591.482,61	165.340.377.149,00	97,31%	Cukup Efektif
2022	200.314.165.508,71	189.895.654.914,00	105,44%	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata antara realisasi pendapatan asli daerah dan target penerimaan daerah berada pada cukup efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya sudah memenuhi target penerimaan pendapatan asli daerah walaupun pada tahun 2020-2021 belum memenuhi seluruhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah wabah *COVID-19* yang menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi sehingga menurunkan indeks pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima. Biaya pemerolehan PAD dikeluarkan dalam kaitannya dengan penagihan komponen-komponen pendapatan asli daerah seperti penagihan pajak dan retribusi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah antara lain insentif pemungutan pajak dan insentif pemungutan retribusi.

Tabel 5.
Rasio Efisiensi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Pemerolehan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Persentase	Keterangan
2020	5.092.448.439	151.009.789.228,78	3,37%	Sangat Efisien
2021	4.418.351.724	160.894.591.482,61	2,74%	Sangat Efisien
2022	5.500.156.001	200.314.165.508,71	2,74%	Sangat Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan data yang telah diolah, pada tahun 2020, hasil rasio efisiensi yang didapat adalah 3,37%, hal ini berarti tingkat efisiensi yang didapat adalah sangat efisien karena rasio yang didapatkan dalam rentang <60%. Pada tahun 2021 hasil rasio efisiensi adalah 2,74% yang berarti tingkat efisiensinya adalah sangat efisien. Begitupula pada tahun 2022 hasil rasio efisiensi adalah 2,74% yang berarti tingkat efisiensinya sangat efisien. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam tiga tahun terakhir telah mengalami peningkatan efisiensi PAD.

3.2. Faktor Penghambat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Faktor penghambat kemandirian keuangan daerah kabupaten Kubu Raya disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi daerah yang cukup beragam dan belum dimanfaatkan. Kabupaten Kubu Raya memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh kawasan pertanian dan perkebunan sehingga apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka hal tersebut dapat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi PAD Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat lebih memperhatikan keadaan para pekerja seperti buruh tani dan perkebunan yang ada, memberikan sejumlah bantuan fasilitas yang akan menunjang hasil panen yang lebih baik. Sehingga dapat menjadi salah satu keunggulan bagi Kabupaten Kubu Raya apabila hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke daerah-daerah lain.

Faktor lain yang menjadi penghambat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ialah berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan keuangan menunjukkan bahwa masih sangat tinggi, serta rasio kemandirian daerah yang tergolong sangat rendah. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan rasio ketergantungan keuangan dan kemandirian yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berada pada interval kategori yang dinilai sangat tinggi dan sangat rendah. Dilihat pada anggaran pendapatan Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2020-2022 masih bergantung dan sangat didominasi oleh besarnya kontribusi dana yang berasal dari pihak eksternal, dimana pemerintah pusat berperan besar dalam memfasilitasi kegiatan dan program pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Besarnya dana transfer tersebut juga disebabkan karena banyaknya *mandatorispending* yang diamanatkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah. Sehingga hak tersebut menimbulkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi dan apabila terus terjadi maka daerah tidak akan secara maksimal dalam mengeksplorasi potensi-potensi yang ada pada daerahnya dalam rangka untuk meningkatkan PAD daerahnya sehingga akan turut mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer.

3.3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Pemrintah Kabupaten Kubu Raya berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan menggali potensi baru sebagai sumber penerimaan PAD. Tentunya hal ini akan menambah dalam hal realisasi pemungutan pendapatan daerah. Bertambahnya sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam hal kapasitas tentunya dengan pemanfaatan potensi daerah yang dapat digali dengan semaksimal mungkin sehingga tidak ada potensi daerah Kabupaten Kubu Raya yang terabaikan dan tidak dikelola dengan baik, mengingat begitu banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga telah melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi atas pemungutan pajak serta retribusi daerah. Pemerintah daerah juga selalu berupaya dalam pengendalian dan pengawasan bagi para wajib pajak yang diikuti dengan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat. Hal-hal yang telah dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat yang

dilakukan melalui media reklame, media sosial, radio, pembuatan video dan berbagai iklan layanan masyarakat, yang dimaksudkan agar masyarakat lebih patuh dalam pembayaran pajak. Dalam segi regulasi pemerintah daerah melakukan penguatan aturan-aturan teknis pengawasan dan penarikan Pajak (khusus Pajak Reklame, MBLB dan Parkir) dan penegakan aturan yang sudah ada (seperti penggunaan cas register/Bon Bill dalam laporan omzet) untuk semua jenis Pajak untuk mengoptimalkan potensi Pajak yang ada. Kemudian, melakukan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), penggunaan Tapping Box dan e-post dalam penarikan Pajak dan penguatan mekanisme koordinasi dan Konsultasi antara petugas pajak dan wajib pajak untuk lebih meningkatkan pendapatan dari Sektor Pajak serta pemasangan CCTV sebagai alat bantu kontrol terkait pajak MBLB.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan dengan penelitian Royda dan Dwi Riana, 2019 menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya masih tergolong sangat rendah karena berada pada kisaran 0-25% yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan yang sangat rendah dan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. f. Berbeda dengan penelitian R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung, dkk, 2022 yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah dalam kategori sangat tinggi. Tingginya rasio kemandirian keuangan tersebut hubungan keuangan partisipatif, Kabupaten Kubu Raya justru menunjukkan kenaikan dalam kemandirian keuangan daerah walaupun belum mampu masuk dalam kategori mandiri.

Temuan ini memperkuat penelitian Fahriasnyah Syam dan Ahmad Zulfikar, 2022 bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah sehingga dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang dan bergantung pada pemerintah pusat. Penelitian ini memperkuat temuan Jovan Febriantoko, 2017 yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal menemukan bahwa perana PAD masih kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan pendapatan dan dapat diartikan penyusunan RAPBD belum didukung oleh konsep kemandirian daerah secara keuangan.

Dalam konteks faktor penghambat kemandirian keuangan daerah, penelitian ini mengidentifikasi belum optimalnya penggalan potensi-potensi daerah dan ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya terhadap dana transfer yang sejalan dengan penelitian Kamilaus Konstantae, dkk, 2020 yang memiliki potensi sumber daya alam potensial yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah. Upaya yang dilakukan menggali potensi baru sebagai sumber penerimaan PAD dan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi atas pemungutan pajak serta retribusi daerah

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat masih sangat rendah selama tahun 2020-2022. Meskipun setiap tahunnya mengalami perbaikan menurut analisis rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas pengelolaan PAD, serta rasio efisiensi PAD. Faktor penghambat kemandirian keuangan daerah meliputi belum optimalnya penggalan potensi-potensi daerah dan ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya terhadap dana transfer. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini ialah dilakukan menggali potensi baru sebagai sumber penerimaan PAD dan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi atas pemungutan pajak serta retribusi daerah

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu yang hanya mencakup periode 2020-2022, sehingga mungkin tidak mencerminkan perbandingan dalam jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kubu Raya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell. J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah (Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Febriantoko, Jovan. 2017. Analisis Kemampuan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera. Seminar Nasional Teknologi Informasi Bisnis dan Desain.
- Hadi, S. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat kemandirian keuangan daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 27-41.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nora, Anjar. dkk 2018. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend Pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Bisma Jurnal Manajemen*
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 1-6.
- Riana, D. (2019). Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 50-64.
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati, R. (2022). ANALISIS TINGKAT RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96-111.
- Septi Rindawati. (2021). *Responsibilitas Pengelolaan APBD*. Media Sains Indonesia.
- Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Siregar, A. O. D., & S, I, 2020. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat)”, Jurnal Image.

Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(2), 98-114.

Zulkarnain, Z. 2020. “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Barat”, Jurnal Cakrawala.

